



fern

MAKING EUROPE WORK
FOR PEOPLE & FORESTS

**MENCIPTAKAN SEBUAH PLATFORM
UNTUK MENGUMPULKAN DAN
MEMVISUALISASIKAN BERBAGAI DAMPAK
SOSIAL DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA**

PELAJARAN DARI BRASIL

NOVEMBER 2025



Date: November 2025

Sampul depan: Masyarakat Xavante adalah Masyarakat Adat yang tinggal di Cerrado. Foto: Seorang perempuan Xavante, oleh Raissa Azeredo/NINJA Media

Sampul belakang: Hutan hujan Amazon di Mato Grosso, Brasil oleh Octavio Campos Salles/Alamy

Desainer: Sylwia Niedaszowska



Fern Office UK

1C Fosseyway Business Centre, Stratford Road,
Moreton in Marsh, GL56 9NQ, UK

Fern office Brussels

rue d'Edimbourg 26,
1050 Brussels, Belgium

www.fern.org

Laporan ini ditugaskan oleh Fern. Proyek ini dikelola oleh Nicole Polsterer. Semua penelitian dan penulisan diselenggarakan dan dilakukan oleh Dr. Maria-Therese Gustafsson, Dr. Almut Schilling-Vacaflor, Dr. Vivian Ribeiro, dan Dr. Gabriela Russo Lopes. Edit disarankan oleh Nicole Polsterer dan Richard Wainwright.



Laporan ini dibuat dengan dukungan finansial dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama dan Pembangunan (BMZ), yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dan Badan Eksekutif Iklim, Infrastruktur, dan Lingkungan (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) Uni Eropa. Dalam cara apa pun, pandangan yang diungkapkan tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan Fern atau para donatur.

Daftar Isi

Akronim	4
I. Pengantar	5
II. Mengapa Kita Perlu Memvisualisasikan Dampak Sosial dan Hak-Hak Asasi Manusia?	7
III. Gambaran Umum Basis Data dan Sumber Data yang Ada	9
IV. Proses Multi-Pemangku Kepentingan dan Penetapan Prioritas Basis Data Tertentu	11
Pertemuan Virtual dan Tatap Muka Fisik	11
Pilihan Data dan Cakupan Platform Sosial	13
Penggunaan dan Perwakilan Data	14
Tata Kelola	14
V. Platform Percontohan	15
Konflik Sosial	16
Deforestasi dan Embargo	17
Produksi	18
Profil Sosial Lingkungan	19
Pengujian Pengguna	20
VI. Pelajaran Penting yang Dipetik	21
VIII. Referensi	23
VIV. Lampiran. Peserta di lima lokakarya	24

Akronim

ANA	Badan Air dan Sanitasi Nasional (<i>Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico</i>)
ANM	Badan Pertambangan Nasional (<i>Agência Nacional de Mineração</i>)
CPT	Komisi Lahan Pastoral (<i>Comissão Pastoral da Terra</i>)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
EUDR	Peraturan Deforestasi Uni Eropa (<i>European Union Deforestation Regulation</i>)
FUNAI	Yayasan Nasional Indian (<i>Fundação Nacional dos Povos Indígenas</i>)
HREDD	Hak-Hak Asasi Manusia dan Uji Tuntas Lingkungan (<i>Human Rights and Environmental Due Diligence</i>)
IBGE	Institut Geografi dan Statistik Brasil (<i>Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</i>)
IBAMA	Institut Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil (<i>Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</i>)
ICMBio	Institut Chico Mendes untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati (<i>Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade</i>)
INCRA	Lembaga Nasional untuk Kolonisasi dan Reforma Agraria (<i>Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária</i>)
MTE	Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (<i>Ministério do Trabalho e Emprego</i>)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PCTAF	Masyarakat Hukum Adat (<i>Povos, Comunidades Tradicionais e Agricultura Familiar</i>)
RadarSIT	Platform Transparansi Sekretariat Pengawasan Ketenagakerjaan (<i>Radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho</i>)
SFB	Dinas Kehutanan Brasil (<i>Serviço Florestal Brasileiro</i>)
SUS	Sistem Kesehatan Terpadu (<i>Sistema Único de Saúde</i>)

I. Pengantar

Deforestasi (penggundulan hutan) merupakan masalah dengan banyak aspek (multifaset) yang berkaitan erat dengan tantangan keberlanjutan utama lainnya, termasuk dampak hak-hak asasi manusia dan perampasan tanah yang dihuni dan digunakan oleh Masyarakat Adat, komunitas tradisional, dan petani keluarga (PCTAFs) dari lahan yang mereka huni dan gunakan (Schilling-Vacaflor & Gustafsson 2024; Merino & Gustafsson 2021). Wilayah-wilayah ini mencakup sekitar seperempat luas daratan Brasil dan sangat penting bagi keanekaragaman hayati, sumber daya air tawar, serta penyimpanan karbon global (Garnett dkk. 2018; Sauer dkk. 2018). Namun, PCTAF di bioma Amazon dan Cerrado sering kali tidak memiliki sertifikat tanah resmi, dan bahkan masyarakat lokal dengan lahan yang telah dibatasi pun dalam banyak kasus terdampak oleh perluasan agribisnis, contohnya: kehilangan akses ke lahan, wilayah, atau sumber air, atau akibat kontaminasi pestisida (Baletti 2014; Russo Lopes dkk. 2021). Selain itu, ada juga berbagai dampak hak-hak asasi manusia lainnya, seperti perbudakan modern, pekerja anak, atau pelanggaran hak-hak buruh, yang telah dikaitkan dengan rantai pasok pertanian di Brasil (Phillips & Sakamoto 2012; Brendão dkk. 2024).

Data yang kuat tentang dampak biofisik, seperti deforestasi dan perubahan penggunaan lahan yang terkait dengan rantai pasok pertanian, tersedia di Brasil dan di sebagian besar negara di seluruh dunia (Gardner dkk. 2019). Brasil memiliki basis data publik yang mapan untuk menilai dampak biofisik—misalnya, data deforestasi dari Institut Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa (INPE), dan daftar lahan yang diembargo akibat pelanggaran lingkungan yang dikelola oleh Institut Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil (IBAMA). Platform yang dipimpin oleh masyarakat sipil, MapBiomas, bahkan telah berhasil mengintegrasikan data dari sejumlah besar basis data yang berbeda ke dalam satu platform akses terbuka yang mudah digunakan, yang memerinci penggunaan dan tutupan lahan sejak tahun 1985 hingga saat ini (Souza dkk. 2020). Inisiatif ini telah meluas ke negara-negara lain, bukan hanya perluasan yang paling besar di Amerika Latin, tetapi juga di Indonesia. Perlu dicatat bahwa platform terintegrasi yang serupa tentang berbagai dampak hak-hak asasi manusia masih belum ada. Memang benar, data penting tentang dampak hak-hak asasi manusia, seperti konflik lahan, menurunnya akses masyarakat lokal ke air, dan dampak kesehatan yang dipicu oleh penggunaan pestisida atau pelanggaran hak-hak pekerja di Brasil masih terbatas, tidak merata, terkotak-kotak, dan sering kali tidak merujuk koordinat geografi dunia nyata; georeferensi (Fern 2024; May & Ozinga 2021).

Kurangnya data yang spesifik, terkini, dan mudah diakses tentang dampak hak-hak asasi manusia menyulitkan pelaksanaan penilaian dan pemantauan yang baik. Kesenjangan pengetahuan dan data tersebut menjadi faktor dalam pengabaian hak, kebutuhan, dan perspektif Masyarakat Adat, komunitas tradisional, dan petani keluarga, baik dalam kebijakan publik di negara-negara produsen maupun dalam tata kelola bisnis transnasional. Lebih lanjut, mengabaikan hak dan perspektif PCTAF dalam tata kelola keberlanjutan sering kali menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan pada para pelaku perdesaan yang rentan tersebut. Misalnya, tanpa pendekatan berbasis hak, upaya konservasi di Brasil telah berkontribusi dalam praktik “perampasan lahan hijau”, yang mengakibatkan perampasan PCTAF dari lahan mereka (Silva dkk. 2023). Organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), gerakan sosial, dan organisasi akar rumput, telah memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis mereka terhadap PCTAF. Namun, upaya ini sering kali dilemahkan oleh kurangnya data yang andal dan mudah diakses tentang dampak hak-hak asasi manusia (Gustafsson dan Schilling-Vacaflor, mendatang).

Dengan latar belakang ini, melengkapi, meningkatkan, menyistamkan, dan melakukan triangulasi data serta pengetahuan yang ada dengan akses terbuka dan mudah digunakan sangat penting dalam memberdayakan para pemegang hak dan masyarakat terdampak serta koalisi masyarakat



sipil mereka. Data tersebut bukan hanya penting untuk perencanaan dan pemastian pengelolaan produksi pertanian serta pangan yang berkelanjutan dan adil, tetapi juga untuk membentuk kebijakan yang responsif, memantau dampaknya, dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas para pemegang hak dan masyarakat terdampak untuk mengadvokasi kebutuhan mereka.

Untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan data serta menciptakan visibilitas yang lebih besar atas dampak hak-hak asasi manusia, sekelompok OMS Brasil, yang didukung oleh Fern, memulai sebuah proyek pada tahun 2023 untuk mengembangkan Platform percontohan yang bertujuan mengintegrasikan berbagai data tentang dampak hak asasi manusia dan konflik terkait. Setelah lima lokakarya pemangku kepentingan, sistematisasi basis data yang ada, survei pemangku kepentingan, dan banyak sekali wawancara dengan OMS, proses awal ini mencapai puncaknya pada bulan Februari 2025 dengan peluncuran prototipe pertama: sebuah "Platform Sosial" interaktif yang menyediakan data georeferensi tentang konflik perdesaan dan lahan.

Prosesnya tidak berhenti di sini. Sebuah jaringan OMS Brasil, yang dikoordinasikan oleh Instituto Sociedade População Natureza (ISPN), kini bekerja secara intensif untuk memperluas dan menyempurnakan Platform demi menciptakan alat akses terbuka yang dapat diakses publik yang merespons prioritas dan kebutuhan data OMS serta para pemegang hak di Brasil.

Laporan ini menyediakan gambaran umum proses di balik pembentukan Platform ini, menampilkan studi percontohan yang telah dikembangkan, dan menyajikan pembelajaran yang mungkin juga relevan untuk inisiatif serupa yang akan dikembangkan di negara-negara lain.

Tujuan utamanya adalah untuk:

- menjajaki berbagai penggunaan data tentang dampak sosial dan hak-hak asasi manusia;
- membahas data yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan, dengan fokus pada Brasil;
- mendeskripsikan Platform percontohan yang diselenggarakan di Brasil; dan
- mengidentifikasi pembelajaran yang lebih luas untuk pembentukan platform serupa di negara-negara lain. identify broader lessons for the creation of similar platforms in other countries.

II. Mengapa Kita Perlu Memvisualisasikan Dampak Sosial dan Hak-Hak Asasi Manusia?

Produksi komoditas pertanian, seperti daging sapi, kakao, kopi, jagung, kapas, kedelai, minyak sawit, karet, tebu, dan kayu, telah memperburuk masalah deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta perubahan tata guna lahan di Brasil (Souza dkk. 2020). Permasalahan-permasalahan ini telah dikaji dan dipantau pada tingkat yang berbeda-beda. Ada berbagai inisiatif tata kelola publik dan swasta domestik dan transnasional untuk mengatasi deforestasi serta masalah lingkungan lainnya yang terkait dengan rantai pasok pertanian. Contoh domestik inisiatif semacam ini adalah Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Amazon Legal dan di Cerrado (*Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal*, (PPCDAM) dan *Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado*, (PPCerrado)) dan Pedoman Kehutanan Brasil serta undang-undang lingkungan hidup. Ada pula inisiatif pasar yang menasar rantai pasok pertanian global, seperti Moratorium Kedelai, Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR), Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), dan berbagai standar sertifikasi keberlanjutan (cth.: Roundtable on Sustainable Soy, ProTerra, Forest Stewardship Council, dan Rainforest Alliance).

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hak, perspektif, dan kebutuhan PCTAF sering kali diabaikan atau diremehkan dalam perancangan dan penerapan sebagian besar instrumen tata kelola keberlanjutan rantai pasok global yang ada (Bastos Lima & Persson 2020; Schilling-Vacaflor 2023). Dengan tujuan berkontribusi untuk keadilan lingkungan dan pendekatan berbasis hak dalam tata kelola rantai pasok, sangatlah penting untuk mengetahui dan menunjukkan dampak sosial dan hak-hak asasi manusia yang terkait dengan rantai pasok global—di samping dampak biofisik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa deforestasi, spekulasi tanah, dan perluasan lahan pertanian untuk pertanian skala besar yang berorientasi ekspor berkaitan erat dengan dampak sosial dan hak-hak asasi manusia, seperti konflik lahan dan perampasan lahan, polusi pestisida, berkurangnya akses PCTAF ke air bersih, kekerasan terhadap para pembela lahan dan lingkungan, serta pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk pekerja anak dan perbudakan modern (Russo Lopes dkk. 2021). Apa yang kita ketahui tentang berbagai risiko dan dampak ini? Bagaimana kita dapat menyatukan pengetahuan yang terkotak-kotak dan memvisualisasikan data yang ada?

Pertanyaan-pertanyaan ini memandu beragam organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia melalui dalam mengembangkan Platform untuk Mengumpulkan dan Memvisualisasikan Dampak Sosial dan Hak Asasi Manusia (“Platform Sosial”). Fern juga menyelenggarakan tiga lokakarya pemangku kepentingan secara online dan tiga lokakarya hibrida; online dan offline, yang terakhir (hibrida) berlangsung di Brasil. Organisasi-organisasi ini memiliki beragam perspektif yang berbeda tentang cara menggunakan Platform Sosial ini. Beberapa dari mereka menekankan pentingnya data yang kuat dan sistematis tentang dampak hak-hak asasi manusia untuk mendukung reformasi kebijakan domestik. Sementara yang lainnya memandang platform ini sebagai sarana untuk menghasilkan data yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional. Beberapa organisasi menyoroti pandangan bahwa Platform Sosial harus digunakan sebagai alat yang dapat melengkapi inisiatif seperti [“Observatorium Hutan”](#) yang dipimpin Uni Eropa, yang memantau deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Berbagai perspektif ini tercermin dalam pertemuan para pemangku kepentingan selama pengembangan Platform, yang membahas tujuan kebijakan domestik dan tujuan tata kelola keberlanjutan transnasional. Dalam pertemuan-pertemuan ini, banyak organisasi sepakat bahwa Platform dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mendukung strategi advokasi domestik dan transnasional untuk menegakkan hak-hak dalam produksi pertanian dan rantai pasok global, baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif.

Konteks domestik Brasil: Basis data yang tersedia bagi publik di Brasil sejauh ini berfokus pada topik-topik tertentu, seperti deforestasi, kasus perbudakan modern, daftar embargo pelanggaran lingkungan, serta izin untuk deforestasi dan irigasi. Namun, data yang lebih komprehensif dan tersistematisasi dengan baik tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia dan konflik dapat benar-benar memperkuat pembuatan kebijakan domestik dan advokasi masyarakat sipil. Misalnya, data tentang konflik pedesaan dan kekerasan terhadap PCTAF dapat memantapkan kebijakan yang bertujuan memajukan sertifikasi tanah serta memastikan perlindungan lahan dan wilayah yang lebih efektif di lapangan. Serupa dengan itu, data tentang polusi pestisida dan hilangnya akses ke air bersih dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pemantauan lingkungan, khususnya yang melacak kualitas dan ketersediaan air. Semua perbaikan ini tidak hanya akan membantu meminta perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif sosial dan lingkungan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan publik.

OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Brasil menekankan perlunya Platform Sosial independen yang dipimpin oleh Organisasi Masyarakat Sipil, yang berfokus pada prioritas dan kebutuhan Organisasi Masyarakat Sipil Brasil dan pemegang hak, bukannya berfokus pada pendukung kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang Uni Eropa.

Tata Kelola dengan Jangkauan Ekstrateritorial: Perusahaan multinasional sering mengabaikan atau hanya menilai dampak sosial dan hak-hak asasi manusia secara selektif dengan menggunakan kekurangan data sebagai alasannya. Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Uji Tuntas Lingkungan (HREDD) terkini—seperti Undang-Undang Rantai Pasok Jerman, Undang-Undang Kewajiban Kewaspadaan Prancis, dan EUDR—telah meningkatkan permintaan akan beragam jenis data sosial-lingkungan tentang risiko dan dampak dalam rantai pasok global (untuk mengetahui ikhtisarnya, lihat Gustafsson dkk. 2023). Undang-undang ini menghadirkan peluang untuk mengumpulkan serta menyistemkan data sosial dan hak-hak asasi manusia, yang telah lama menjadi tuntutan OMS Brasil. Data tersebut dapat mendukung OMS untuk secara aktif memantau kepatuhan terhadap kewajiban HREDD yang wajib dan komitmen keberlanjutan perusahaan yang lebih luas, serta membantu mereka untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Untuk hal ini, data dapat digunakan dalam dialog dengan perusahaan, kampanye advokasi, dan persiapan serta penyampaian pengaduan atau gugatan hukum di tingkat nasional, regional, atau internasional.

EUDR pasal 2(40)

Pasal 2(40): “perundang-undangan yang relevan di negara produksi” berarti undang-undang yang berlaku di negara produksi mengenai status hukum wilayah produksi dalam hal:

- hak-hak penggunaan lahan;
- perlindungan lingkungan;
- aturan terkait kehutanan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, jika terkait langsung dengan pemanenan kayu;
- hak-hak pihak ketiga;
- hak-hak buruh;
- hak-hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan hukum internasional;
- prinsip persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), termasuk sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.



Orang Quilombola memegang hak atas tanah kolektif yang diakui secara konstitusional, namun sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam mendapatkan hak-hak ini, menjadikan mereka pelaku sentral dalam sengketa tanah dan konflik sosial terkait di Brasil. Gambar: Sebuah Quilombo atau pemukiman otonom di Sungai Guaporé di Rondônia, Brasil, oleh Pedro Carrilho/Shutterstock

Platform yang dipimpin oleh masyarakat sipil juga dapat berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi Otoritas Kompeten di negara-negara pengimpor yang bertugas memantau kepatuhan terhadap kewajiban HREDD. Lebih lanjut, data tersebut dapat mendukung perusahaan itu sendiri dengan menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak buruk dalam rantai pasok mereka dan membantu mereka memanfaatkan pengaruh mereka secara lebih efektif untuk berinteraksi dengan para pemegang hak dan memperbaiki kondisi di lapangan. Pada saat yang sama, para peserta menekankan bahwa basis data ini tidak boleh berubah menjadi “pusat informasi”, dalam arti menyediakan data yang dapat digunakan sebagai alat kepatuhan bagi perusahaan. Sebaliknya, dalam konteks masa kini dimana telah terjadi ledakan teknologi digital di mana penyedia data telah muncul dan semakin banyak menjual data tentang risiko dan dampak hak-hak asasi manusia, penting bagi masyarakat sipil untuk memiliki kepemilikan atas perangkatnya sendiri, yang dibangun secara kuat berdasarkan suara dan pengalaman para pemegang hak (“pembuktian lapangan untuk data”). Hal ini penting untuk mendorong pendekatan HREDD yang lebih berpusat pada pekerja dan komunitas.

III. Gambaran Umum Basis Data dan Sumber Data yang Ada

Sebagai dasar diskusi selanjutnya dalam pertemuan multi-pemangku kepentingan untuk mengembangkan Platform Sosial, peneliti Dr. Almut Schilling-Vacaflor (Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg) dan Dr. Maria-Therese Gustafsson (Stockholm University) mengeksplorasi dan mensistemkan data yang ada mengenai dampak sosial dan hak-hak asasi manusia di Brasil. Mereka melakukannya melalui riset desktop dan dengan menyelenggarakan

wawancara mengenai sumber data yang ada dan bermanfaat dengan banyak OMS dan ilmuwan data. Mengingat pentingnya hak atas tanah dan wilayah serta kaitannya yang erat dengan deforestasi dan rantai pasok pertanian, para peneliti mulai melakukan penelusuran yang lebih sistematis terhadap data yang ada terkait permasalahan kebijakan ini, dengan mengidentifikasi data mengenai:

- Penggunaan lahan dan deforestasi;
- Masyarakat Adat dan Hak Atas Tanah Quilombola¹;
- Inisiatif pemetaan komunitas;
- Konflik lahan dan perdesaan.

Selain itu, dengan gagasan untuk memperluas Platform Sosial ini agar mencakup permasalahan sosial dan hak-hak asasi manusia lainnya pada masa mendatang, para peneliti juga bertujuan mengeksplorasi sumber data tambahan yang akan menunjukkan berbagai dampak, seperti perbudakan modern dan pelanggaran hak buruh, hak atas air, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, dampak kesehatan, serta kekerasan dan ancaman terhadap para pembela tanah, hak asasi manusia, dan lingkungan. Gambar 1 menunjukkan daftar basis data yang diidentifikasi dalam pencarian awal dan digunakan sebagai dasar diskusi dalam lokakarya pertama pemangku kepentingan.

Gambar 1. Daftar data teridentifikasi yang berpotensi dimasukkan ke dalam Platform Sosial, dengan fokus pada hak atas tanah dan wilayah PCTAF.

Berbagai jenis data (basis data dan platform)

Penggunaan lahan dan deforestasi

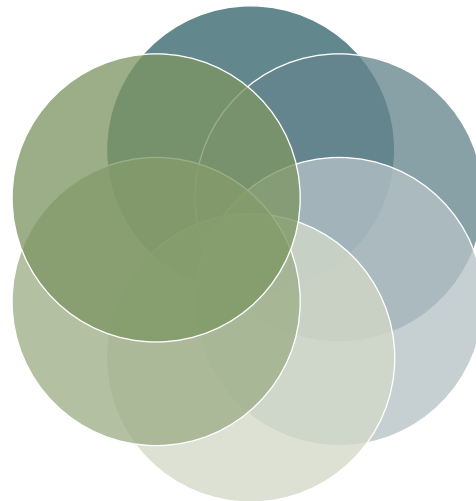
(PRODES; DETER; Mapbiomas (Alert); CAR & IBGE)

Dampak sosial lainnya

(Daftar perbudakan modern; data SUS tentang keracunan pestisida; data SUS tentang kekerasan; lab SMART tentang hak-hak buruh & data ANA/EMPRAPA tentang izin irigasi)

Platform

(Atlas Agropecuário; Mapa dos Conflitos & Tamo de Olho)



Hak atas tanah, termasuk hak atas tanah PCTAF

(FUNAI; data INCRA tentang pemukiman agraria; data INCRA tentang Quilombolas; data tentang tanah dan hutan publik; Fundação Palmares; Censos & IBGE)

Pemetaan komunitas

(Platform komunitas tradisional (MPF); To no Mapa; Kartografi Sosial Baru; dan basis data UFPA & UFBA)

Lahan dan konflik perdesaan

(data CPT tentang konflik perdesaan dan Dataluta dari UNESP)

¹ Quilombos adalah anggota komunitas Afro-Brasil yang dibentuk oleh keturunan orang Afrika yang diperbudak yang mendirikan permukiman otonom, yang dikenal sebagai quilombos. Mereka memegang hak atas tanah kolektif yang diakui secara konstitusional, namun sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam mendapatkan hak-hak ini, menjadikan mereka pelaku sentral dalam sengketa tanah dan konflik sosial terkait di Brasil.

Identifikasi dan analisis berbagai sumber data dan platform membantu mendapatkan gambaran umum tentang data yang ada dan cara penyusunannya (cth.: data mana yang memiliki georeferensi, dan data mana yang tersedia di tingkat subnasional untuk semua provinsi/negara bagian dan kota madya). Para peneliti menyajikan rangkuman singkat masing-masing sumber data tersebut (Fern 2024).

Lebih lanjut, penyaringan data ini membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan data yang ada. Misalnya, meskipun ada berbagai upaya pemetaan komunitas tanpa sertifikat tanah resmi di Amazon dan Cerrado, data tersebut masih belum lengkap dan terkotak-kotak. Upaya ke depan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan ini dan menjamin hak PCTAF untuk tinggal dan menggunakan lahan yang mereka huni harus menjadi prioritas utama dalam pendekatan berbasis hak untuk mengatur produksi pertanian serta rantai pasok.

IV. Proses Multi-Pemangku Kepentingan dan Penetapan Prioritas Basis Data Tertentu

Tujuan inisiatif ini adalah untuk mengembangkan Platform Sosial bekerja sama dengan berbagai OMS dari Brasil, yang masing-masing berkontribusi dengan beragam pengetahuan dan keahlian terkait dampak sosial dan hak-hak asasi manusia. Organisasi akar rumput, termasuk para pemegang hak-hak asasi manusia itu sendiri, merupakan bagian penting dari upaya ini, sebab wawasan mereka yang mendalam dan kepekaan terhadap konteks sangat penting untuk membangun basis data yang memberdayakan sekaligus terhubung dengan perjuangan lokal. LSM lingkungan berukuran besar juga diundang karena sering memiliki kepakaran teknis yang kuat dalam mengumpulkan data yang tersedia, keahlian dalam georeferensi dan menggabungkan berbagai kumpulan data, serta jaringan nasional dan transnasional yang luas. Jurnalis investigasi juga diundang ke pertemuan-pertemuan tersebut karena mereka telah memainkan peran penting dalam menyoroti masalah hak-hak asasi manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan rantai pasok global. Selain itu, organisasi-organisasi yang selama ini menjadi anggota koalisi utama para pemegang hak-hak asasi manusia, seperti PCTAF dan pekerja, berpartisipasi dalam lokakarya pemangku kepentingan yang diselenggarakan.

Banyak peserta menekankan bahwa menyatukan organisasi-organisasi yang beragam ini—yang sering kali bekerja sendiri-sendiri dengan sedikit interaksi—menciptakan ruang bersama yang berharga yang memperkuat jaringan masyarakat sipil di Brasil.

PERTEMUAN VIRTUAL DAN TATAP MUKA FISIK

Sejak tahun 2023 hingga 2025, Fern menyelenggarakan total lima lokakarya pemangku kepentingan—tiga secara offline dan dua online—untuk mengumpulkan masukan dari beragam pelaku masyarakat sipil dalam pengembangan Platform. Sebelum lokakarya tatap muka fisik yang pertama, sebuah pertemuan virtual diadakan pada bulan Juni 2023 untuk membahas tujuan Platform Sosial dan merefleksikan data yang telah diidentifikasi, serta data tambahan yang mungkin ditambahkan ke dalam daftar. Dalam pertemuan-pertemuan ini, para peserta membahas kekuatan dan keterbatasan basis data yang ada, serta bagaimana berbagai kumpulan data dapat digabungkan untuk memvisualisasikan hak penguasaan lahan dan konflik lahan yang melibatkan PCTAF dalam satu peta interaktif online. Selain pertemuan tatap muka fisik, pertemuan virtual juga



Acampamento Terra Livre, mobilisasi terbesar gerakan Masyarakat Adat Brasil, telah diadakan setiap tahun sejak 2004. Gambar oleh Sipa USA/Alamy

diselenggarakan untuk memastikan bahwa para peserta mendapatkan informasi perkembangan terbaru dan dapat memberikan komentar tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan Platform Sosial.

Pertemuan tatap muka fisik pertama diselenggarakan oleh Oxfam di São Paulo pada tanggal 16 November 2023. Sebagai persiapan, Fern dan para konsultan menyelenggarakan survei singkat untuk para peserta, meminta mereka untuk memeringkatkan basis data yang akan mereka prioritaskan untuk dimasukkan ke dalam Platform Sosial. Tanggapan dalam survei ini menyajikan wawasan tentang data yang berpotensi menjanjikan dan kurang menjanjikan untuk dimasukkan dan ditriangulasi dalam Platform percontohan pertama. Tujuannya juga untuk belajar dari pengalaman platform lain yang menggunakan data sosial dan hak-hak asasi manusia. Platform "Atlas Agropecuario" disajikan oleh Imaflora, platform "Mapa dos Conflitos" oleh Agência Pública, dan "Tamo de Olho" oleh WWF. "Atlas Agropecuario" melakukan triangulasi data tentang hak penguasaan lahan individu, kolektif, dan publik. "Mapa dos Conflictos" melakukan triangulasi data tentang berbagai konflik perdesaan dan dampak hak-hak asasi manusia di Amazon, sementara "Tamo de Olho" bertujuan mengidentifikasi tumpang tindih antara deforestasi, produksi pertanian, dan dampak hak-hak asasi manusia dalam konteks lokal tertentu. Kumpulan data ini, beserta data lain yang dibahas selama pertemuan, dijelaskan secara terperinci dalam laporan kebijakan pertama yang diterbitkan mengenai topik ini (Fern, 2024).

Lokakarya tatap muka fisik kedua berlangsung pada tanggal 16 April 2024 di Instituto Socioambiental (ISA) di Brasília. Pada pertemuan ini, para peneliti dari Diversa Socioenvironmental Consultancy, Dr. Gabriela Russo Lopes dan Dr. Vivian Ribeiro mempresentasikan serangkaian peta eksplorasi yang menampilkan spesialisasi data sosial di tingkat kota di seluruh Brasil. Berdasarkan diskusi dalam lokakarya pemangku kepentingan sebelumnya, kumpulan data berikut ini dipilih untuk dimasukkan dalam studi percontohan pertama: (1) konflik air, konflik lahan, dan kekerasan

terhadap individu dari Komisi Lahan Pastoral (CPT); (2) perbudakan dari Kementerian Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Brasil (MTE); (3) embargo deforestasi ilegal dari Institut Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil (IBAMA), serta deforestasi dan konversi ekosistem alami dari MapBiomass Alerta; dan (4) data produksi pertanian dari Institut Geografi dan Statistik Brasil (IBGE).

Analisis eksploratif ini juga menghasilkan sebuah peta rangkuman yang menggabungkan data sosial dan lingkungan untuk menunjukkan bagaimana kedua dimensi ini saling terkait dan untuk memvisualisasikan pola dampak sosial-lingkungan di seluruh Brasil. Studi percontohan ini disambut positif oleh para peserta, yang menekankan bahwa visualisasi data CPT yang tergeoreferensi, khususnya, merupakan langkah maju yang signifikan dan akan sangat bermanfaat bagi pekerjaan banyak OMS di Brasil dan sekitarnya.

Dalam lokakarya pemangku kepentingan tatap muka fisik ketiga, yang diselenggarakan pada bulan Februari 2025 di ISA di Brasilia, para peserta membahas evolusi spasialisasi eksploratif data sosial menjadi peta. Hal ini pertama kali disajikan pada lokakarya tatap muka fisik kedua, dan disertakan dalam versi percontohan Platform Sosial, yang menampilkan perangkat interaktif online utama. Platform percontohan ini dikembangkan melalui kolaborasi antara CPT, Mapbiomas, dan Diversa Socioambiental.

Para peserta secara umum menilai percontohan ini sebagai keberhasilan yang signifikan. Pada saat yang sama, beberapa pertanyaan masih ada: Siapa yang seharusnya menjadi tuan rumah Platform Sosial? Data tambahan apa yang seharusnya diintegrasikan? Perlukah ada kelompok koordinasi untuk mengatur pengembangan Platform lebih lanjut? Ada juga diskusi tentang apakah upaya advokasi terkoordinasi dapat didasarkan pada data yang disajikan.

Organisasi Brasil, ISPN, menawarkan diri untuk mengambil peran utama dalam inisiatif ini dan menyusun proposal untuk mendapatkan pendanaan pihak ketiga.

Beberapa topik utama muncul berulang kali dalam berbagai pertemuan, dan ini penting dipertimbangkan ketika membangun platform tentang dampak sosial dan hak-hak asasi manusia. Semuanya dirangkum di bawah ini.

PILIHAN DATA DAN CAKUPAN PLATFORM SOSIAL

Peserta lokakarya membahas kelebihan dan kekurangan penyertaan berbagai jenis data dalam Platform Sosial. Ada konsensus tentang pentingnya mengintegrasikan data, seperti data konflik perdesaan CPT, data publik tentang perbudakan modern, dan data tentang hak penguasaan tanah individu dan kolektif. Namun, penggunaan dan pengintegrasian jenis data lain, seperti data dari proyek yang berupaya memetakan dan memisahkan komunitas lokal tanpa sertifikat tanah resmi, dianggap lebih sulit. Para peserta sepakat bahwa pendekatan langkah demi langkah untuk mengintegrasikan kumpulan data terpilih akan menjadi cara yang paling tepat dalam memperluas Platform Sosial.

Mengenal Kesenjangan Data: Banyak peserta dalam inisiatif ini menekankan pentingnya mengkomunikasikan bahwa ketiadaan data tentang konflik dan dampak di wilayah tertentu tidak boleh diartikan sebagai ketiadaan masalah-masalah ini. Sebaliknya, penting mengakui bahwa kumpulan data yang ada tidak lengkap dan bahwa wilayah serta isu-isu subnasional tertentu kurang terwakili. Berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data.

Memperluas Platform dengan Studi Kasus Kualitatif: Para peserta berbagi ide-ide inovatif untuk pengembangan Platform lebih lanjut. Ini mencakup integrasi data kualitatif mendalam dan studi kasus, pembuatan basis data yang mendokumentasikan keluhan dan pengaduan yang diajukan oleh PCTAF dan koalisinya, serta pengembangan mekanisme peringatan untuk menandai pelanggaran hak-hak asasi manusia dan konflik yang sedang berlangsung serta membutuhkan tindakan segera.

Selalu Memperbarui Platform: Para peserta menekankan pentingnya memperbarui Platform secara berkala, idealnya minimal setahun sekali. Selain pembaruan data tahunan, akan bermanfaat jika menyertakan peringatan singkat tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia, serupa dengan data DETER² yang hampir seketika dan data Peringatan MapBiomas tentang deforestasi. Meskipun studi percontohan belum menyertakan mekanisme peringatan semacam itu untuk hak-hak asasi manusia atau dampak sosial, hal ini dapat menjadi tugas untuk masa mendatang.

PENGUNAAN DAN PERWAKILAN DATA

Pelapisan dan Triangulasi Sumber Data yang Beragam: Salah satu tujuan utama membangun Platform Sosial adalah memadukan data yang saat ini terkotak-kotak dan tersebar. Mengikuti model MapBiomas, para peserta sepakat bahwa kumpulan data yang berbeda tidak boleh digabungkan menjadi satu lapisan. Sebaliknya, beberapa lapisan perlu ditambahkan agar berbagai sumber data dapat dilihat bersama dalam satu peta, tanpa perlu menyelaraskan semua konsep dan indikator yang mendasarinya.

Interaktif dan ramah pengguna: Peserta lokakarya sepakat bahwa Platform Sosial seharusnya menawarkan antarmuka yang interaktif dan ramah pengguna yang bekerja secara intuitif. Platform ini seharusnya memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai lapisan data sesuai dengan kebutuhan dan minat spesifik mereka.

Menangani Dinamika Konflik Lintas Skala: Para peserta lokakarya menyoroti tantangan geolokasi dampak sosial dan hak-hak asasi manusia karena dampak tersebut “hidup dan dinamis”. Dalam banyak kasus, konflik saling terkait di berbagai skala dan tempat, para pelaku bergerak, bertukar informasi, dan konflik berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, dimensi skala perlu dipertimbangkan secara cermat. Sebuah panduan metodologis perlu dibuat untuk memperjelas bagaimana konflik didefinisikan, dipahami, dan dipetakan.

Menggunakan Data sebagai Indikator, Bukan Bukti: Para peserta menekankan bahwa sebagian besar data yang ditampilkan di Platform Sosial tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum. Sebaliknya, data ini seharusnya digunakan sebagai indikator dampak sosial dan hak asasi manusia yang perlu diperhatikan. Dalam kasus gugatan hukum, verifikasi tambahan atas insiden, misalnya oleh jaksa penuntut umum (Ministerio Público) atau lembaga lain, mungkin diperlukan. Kolaborasi antara Platform Sosial dan lembaga negara perlu dibangun pada masa mendatang untuk memperkuat perannya dalam strategi advokasi politik dan hukum.

TATA KELOLA

Kepemilikan lokal: Para pemangku kepentingan menekankan bahwa tata kelola sama pentingnya dengan pengumpulan data. Sebagian besar peserta sepakat bahwa OMS dan pemegang hak di Brasil harus memimpin proses untuk menentukan data mana yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan, untuk memastikan kepemilikan lokal, legitimasi, dan keselarasan dengan prioritas mereka. Pendanaan yang memadai dan dukungan kelembagaan sangat penting untuk memastikan kapasitas operasional dan keberlanjutan jangka panjang Platform Sosial. Para peserta juga menyoroti perlunya membentuk kelompok khusus yang terdiri dari orang dan organisasi yang berkomitmen untuk mengatur dan mengkoordinasikan Platform.

Pentingnya Persetujuan yang Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC): Ketika data dikumpulkan melalui berbagai inisiatif, seperti pemetaan komunitas, Platform Sosial harus memastikan bahwa persyaratan penting, seperti FPIC Masyarakat Adat, komunitas Quilombola, dan komunitas tradisional, telah dipenuhi dan dihormati. Data tidak boleh divisualisasikan dan dibagikan tanpa persetujuan dari para pemangku kepentingan yang terdampak. Dalam hal penggunaan data CPT, potensi masalah terkait FPIC dan risiko dampak negatif bagi pelaku perdesaan dapat dicegah dengan menggabungkan data di tingkat kota.

2 DETER (Detecção de Desmatamento em Tempo Real) adalah sistem berbasis satelit yang dikembangkan oleh Institut Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa (INPE) Brasil untuk memberikan peringatan hampir seketika (dalam waktu nyata) tentang deforestasi dan degradasi hutan di Amazon. Sistem ini dirancang untuk mendukung upaya pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.

V. Platform Percontohan

Berdasarkan wawasan dari pertemuan pemangku kepentingan sebelumnya, wawancara, dan survei singkat, versi pertama Platform percontohan ini menggabungkan kumpulan data berikut:

Tabel 1. Data yang disertakan dalam Platform percontohan.

Dimensi	Kategori	Sub-kategori	Sumber	Jangka waktu
Data konflik sosial	Konflik Perdesaan	Konflik atas lahan Konflik atas air Perbudakan Kekerasan terhadap individu	CPT	2001-2023
Data lingkungan	Deforestasi dan Embargo	Deforestasi	Mapbioma	1987-2023
		Embargo deforestasi ilegal	IBAMA	1987-2023
Data produksi	Produksi	Ukuran kawanan ternak Luas areal tanam kedelai Luas areal tanam kakao Luas areal tanam kopi Luas areal tanam kelapa sawit Luas produksi karet	IBGE	1987-2023
Profil sosial lingkungan	Platform ini menyediakan profil untuk setiap yurisdiksi yang menggabungkan data dari tiga kategori utama menjadi satu tampilan. Disajikan sebagai bagan radar, platform ini menggunakan skor yang dinormalisasi (dari 1 hingga 10) untuk menunjukkan intensitas setiap proses di wilayah tertentu, relatif terhadap konteks nasional. Pengguna juga dapat membandingkan dua yurisdiksi secara berdampingan.			

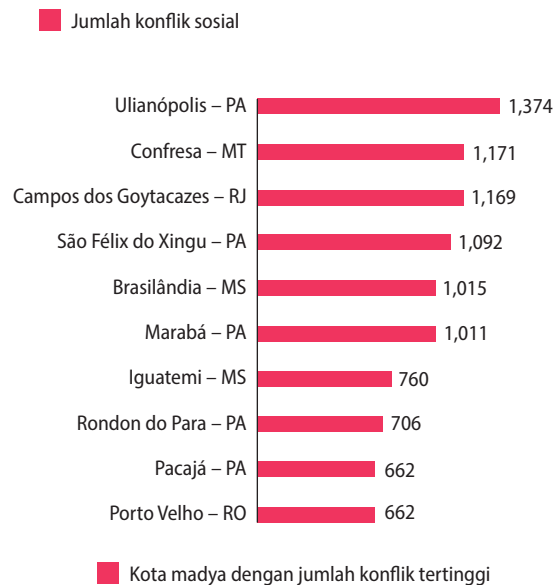
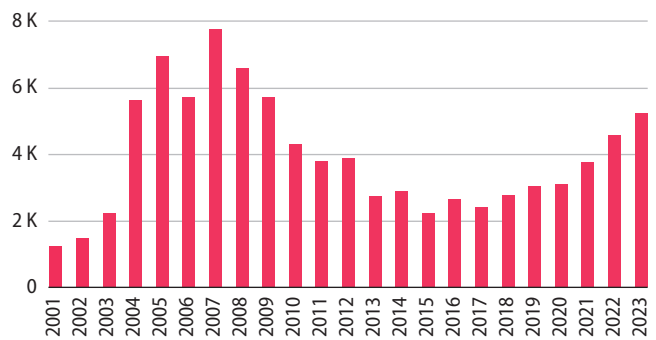
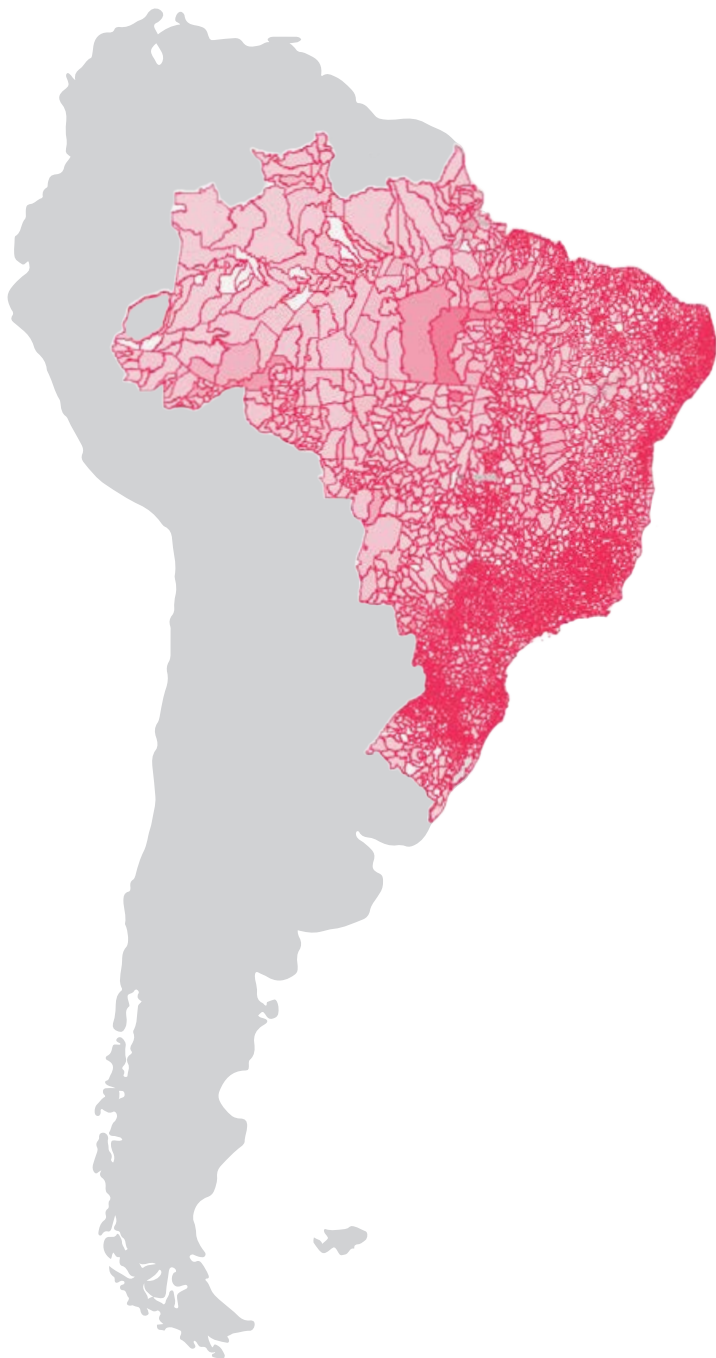
Platform percontohan ini memanfaatkan kumpulan data ini untuk mengatur data ke dalam empat kategori utama: konflik sosial; dampak lingkungan; produksi; dan analisis sosial-lingkungan. Analisis sosial-lingkungan menggabungkan semua sumber data untuk membuat profil sederhana untuk yurisdiksi tertentu (cth.: kota madya, provinsi/negara bagian). Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membandingkan pola dan mengidentifikasi area dengan dampak sosial-lingkungan yang kemungkinan lebih parah. Hal ini dapat dieksplorasi di tingkat kota, provinsi/negara bagian, atau nasional, dengan resolusi temporal yang bervariasi, tergantung sumber datanya. Platform ini tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis.

Di bawah ini, masing-masing dari empat kategori data yang termasuk dalam fase awal Platform percontohan ini kami bahas secara lebih terperinci.

KONFLIK SOSIAL

Data konflik sosial adalah kategori pertama yang disajikan pada Platform percontohan. Data ini mencakup sub-kategori berikut: semua konflik, konflik lahan, konflik air, perbudakan, dan kekerasan terhadap individu—yang mencakup berbagai kasus, seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, ancaman pembunuhan, dan pemerkosaan. Pengguna platform dapat memilih tingkat yurisdiksi (kota, provinsi/negara bagian, atau nasional) dan memilih periode waktu yang diinginkan. Data ditampilkan dalam kotak rangkuman dengan total angka, grafik batang deret waktu, dan peringkat kota dengan jumlah insiden tertinggi selama periode yang dipilih. Lihat contohnya pada Gambar 2 di bawah ini.

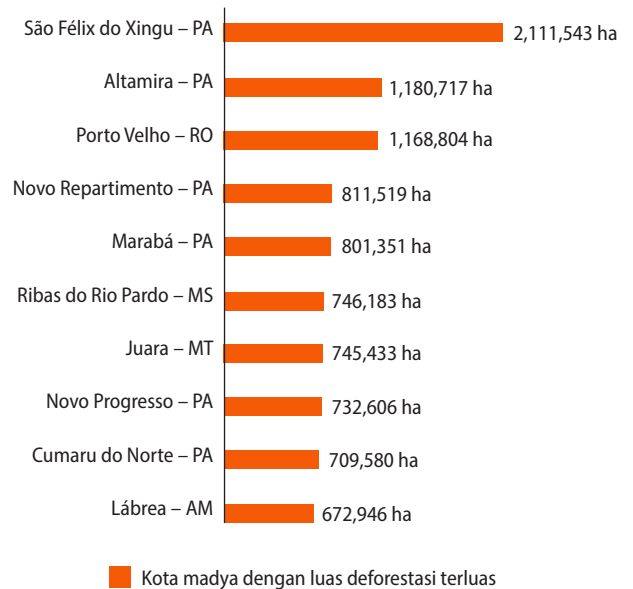
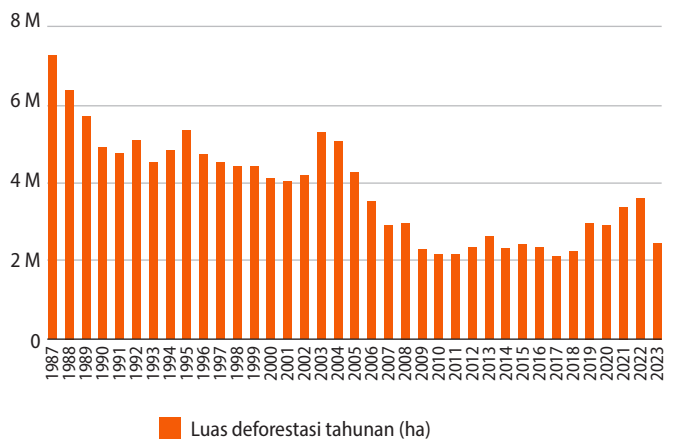
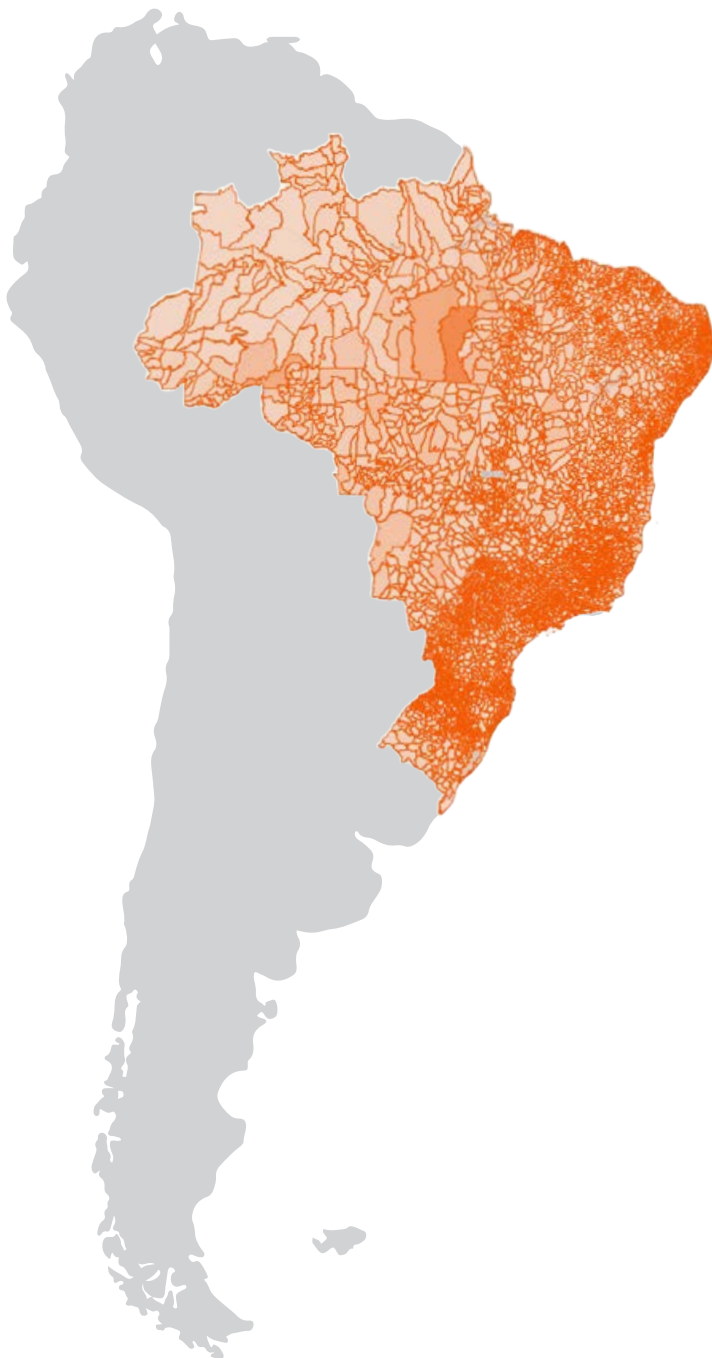
Gambar 2. Data konflik sosial per kota madya selama periode 2001–2023.



DEFORESTASI DAN EMBARGO

Data lingkungan adalah dimensi kedua yang ditampilkan pada Platform percontohan dan dibagi menjadi tiga sub-kategori: deforestasi, embargo untuk deforestasi ilegal, dan jenis embargo lainnya. Pengguna dapat memilih tingkat yurisdiksi (kota madya, provinsi/negara bagian, atau nasional) dan memilih periode waktu yang diinginkan. Data ditampilkan sebagai kotak rangkuman berisi total nilai, diagram batang yang menunjukkan tren dari waktu ke waktu, dan peringkat kota madya dengan jumlah kasus tertinggi selama periode yang dipilih. Lihat contohnya pada Gambar 3 di bawah ini.

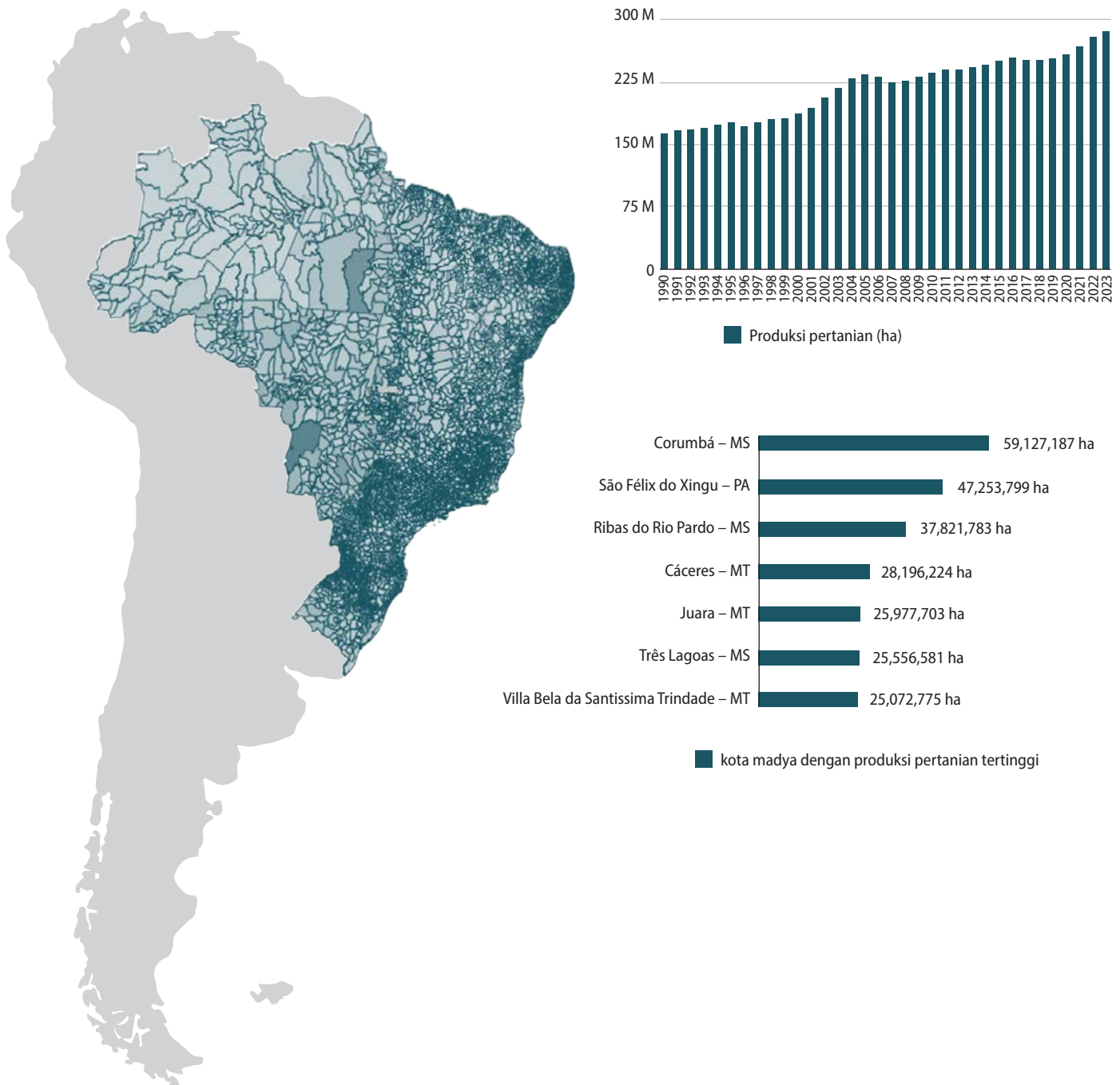
Gambar 3. Data lingkungan per kota madya selama periode 1987–2023.



PRODUKSI

Produksi komoditas adalah kategori ketiga yang ditampilkan pada Platform percontohan. Ini mencakup data komoditas agrifood utama, seperti karet, sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, dan kedelai. Pengguna dapat memilih tingkat yurisdiksi (kota madya, negara bagian, atau nasional) dan periode waktu yang diinginkan. Data disajikan dalam kotak rangkuman berisi total nilai, diagram batang yang menunjukkan tren dari waktu ke waktu, dan peringkat kota madya dengan produksi tertinggi selama periode yang dipilih. Lihat contohnya pada Gambar 4 di bawah ini.

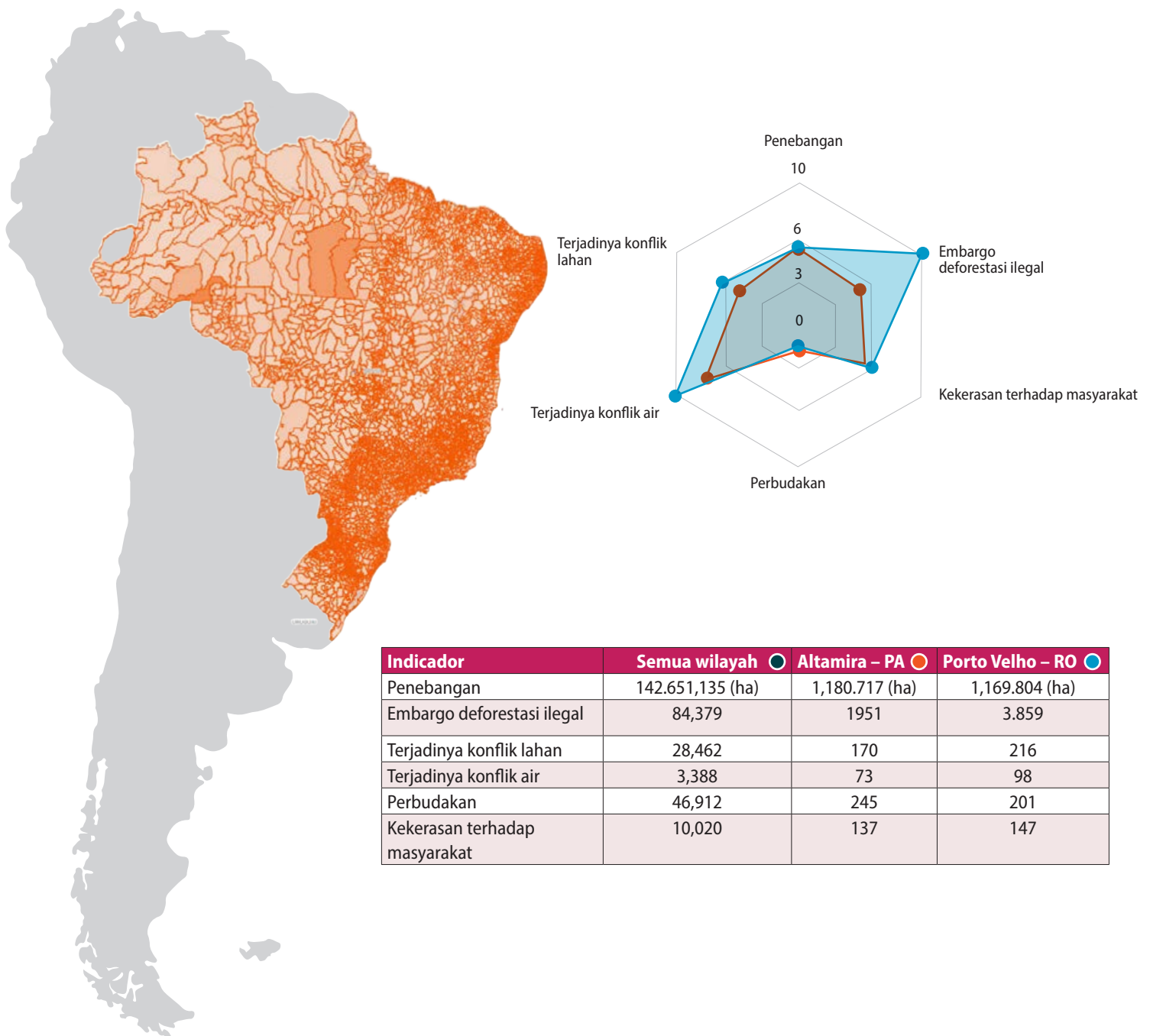
Gambar 4. Data produksi pertanian per kota madya selama periode 1987–2023.



PROFIL SOSIAL LINGKUNGAN

Profil sosial lingkungan adalah kategori keempat dan terakhir yang ditampilkan pada Platform percontohan. Profil ini menggabungkan data dari tiga kategori sebelumnya menjadi satu grafik radar, dengan setiap sumbu mewakili variabel yang diberi skor 0 hingga 10 berdasarkan intensitas relatifnya dibandingkan dengan total jumlah kejadian. Visualisasi ini membantu pengguna memahami situasi di suatu yurisdiksi tanpa membuat penilaian kategoris. Profil ini menyoroti tumpang tindih antara konflik sosial, deforestasi dan embargo, dan produksi komoditas, bukannya menyiratkan hubungan sebab-akibat langsung. Pengguna dapat memilih tingkat yurisdiksi (kota madya, provinsi/negara bagian, atau nasional) dan memilih periode waktu. Hasilnya disajikan sebagai grafik radar yang tumpang tindih dan tabel yang membandingkan total untuk Brasil dan wilayah yang dipilih. Lihat contohnya pada Gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Profil sosial-lingkungan kota madya di Brasil.



PENGUJIAN PENGGUNA

Platform percontohan ini menjalani putaran pertama pengujian pengguna dalam lokakarya pemangku kepentingan yang diadakan di Brasília pada bulan Februari 2025. Perwakilan dari berbagai OMS (lihat lampiran) berpartisipasi dalam sesi tersebut, memberikan umpan balik yang berharga mengenai kegunaan, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna Platform secara keseluruhan.

Beberapa perbaikan disarankan untuk meningkatkan kejelasan, kedalaman, dan kegunaan alat visualisasi data, seperti menjelaskan mengapa periode waktu berbeda di antara kumpulan data dan tab, serta membuat sumber data lebih terlihat dan eksplisit. Selain itu, diusulkan untuk mengklarifikasi upaya pengambilan sampel yang dilakukan oleh CPT guna membantu menempatkan informasi yang disajikan ke dalam konteksnya.

Dalam hal penyajian data, diusulkan agar peta choropleth menyertakan nuansa yang lebih mendalam, dan unit pengukuran—terutama pada tab Produksi—untuk mempermudah penafsirannya. Selain itu, data konflik sosial harus ditunjukkan dalam bentuk area yang terkena dampak, dan bukan (atau sebagai tambahan terhadap) jumlah kejadian, dan jika memungkinkan, data disajikan dalam bentuk absolut dan relatif untuk menghadirkan pandangan yang lebih komprehensif.

Gagasan lainnya adalah memperluas detail geografis agar mencakup tampilan informasi berdasarkan bioma, wilayah geografis utama (seperti Utara, Selatan, Tenggara, Timur Laut, dan Tengah-Barat), dan wilayah-wilayah tertentu, seperti Matopiba dan Amacro.³ Sebaiknya, fungsi perbandingan memungkinkan pengguna melihat lebih banyak provinsi/negara bagian dan kota madya untuk analisis yang lebih luas.

Terakhir, dalam hal isinya, peserta meminta agar variabel tambahan dimasukkan, seperti gender dan ras/etnis. Informasi tentang tanaman kedelai dan padang rumput dari Mapbioma juga dapat diintegrasikan, bersama data tentang embargo tingkat provinsi/negara bagian. Lebih lanjut, penyertaan analisis tentang deforestasi legal dan ilegal akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak lingkungan. Di bawah ini, Tabel 2 menyajikan beberapa sumber data lain yang dapat didalami dan mungkin disertakan dalam versi Platform mendatang:

Tabel 2. Kumpulan data yang berpotensi dimasukkan pada masa mendatang.

Data Tenurial Lahan	Data Buruh	Data Lingkungan	Data Konflik Sosial	Jenis Data Lainnya
Tanah Adat (FUNAI) Tanah Quilombola (Fundação Palmares) Unit Konservasi Pemanfaatan Berkelanjutan (ICMBio) Land Reform Settlements (INCRA)	Buruh Anak (MTE/RadarSIT) Budak/Buruh Paksa (MTE/RadarSIT) Pelanggaran Terkait Tenaga Kerja (MTE/RadarSIT)	Registri Lingkungan Perdesaan (SFB) Jenis embargo lainnya (IBAMA) Embargo tingkat provinsi/negara bagian (Badan-badan negara)	Jenis konflik lainnya (CPT) Kasus kualitatif (CPT)	Data kesehatan (SUS) Data air (ANA) Data pertambangan (ANM)

³ Amacro merujuk wilayah tiga perbatasan antara negara bagian Amazonas, Acre, dan Rondônia di Brasil. Sistem ini merupakan bagian dari inisiatif pembangunan regional yang tumpang tindih dengan wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi, konflik sosial-lingkungan, dan wilayah adat.

VI. Pelajaran Penting yang Dipetik

Bagian ini merangkum pelajaran yang dipetik dari proses pengembangan Platform Sosial di Brasil, yang mungkin juga menginformasikan inisiatif serupa di negara-negara lain. Untuk menyusun bagian ini, Almut Schilling-Vacaflor dan Maria-Therese Gustafsson mewawancarai beberapa peserta yang telah berpartisipasi dalam inisiatif ini, meminta mereka untuk memberikan umpan balik, menyampaikan pelajaran yang mereka petik, dan merenungkan kekuatan, keterbatasan, dan tantangan yang dihadapi selama proses ini.

Secara keseluruhan, para peserta memandang inisiatif ini sebagai keberhasilan yang penting, menyoroti potensinya untuk meningkatkan visibilitas, kesadaran, dan pemberdayaan PCTAF, serta mendukung perlindungan hak-hak mereka dalam rantai pasok pertanian. Pada saat yang sama, mereka menyampaikan refleksi penting tentang bagaimana proses pada masa mendatang dapat disusun dan diperkuat.

1. Kepekaan terhadap konteks dan inklusivitas

Proses pengembangan platform sosial perlu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang realitas nasional dan lokal. Pengetahuan tentang ketersediaan data, dampak lokal, dan dinamika masyarakat sipil sangat relevan. Bekerja sama secara erat dengan beragam organisasi lokal dan nasional (cth.: LSM lingkungan dan hak asasi manusia, organisasi akar rumput, organisasi Masyarakat Adat, dan/atau perwakilan pemangku hak, serikat pekerja, dan jurnalis investigasi) dengan cara yang tepat sejak awal memastikan prosesnya inklusif dan dibangun berdasarkan keahlian dan hubungan yang sudah ada.

2. Klarifikasi cakupan dan tujuan sejak dini

Untuk memastikan bahwa para peserta mendapatkan informasi yang memadai tentang tujuan dan cakupan inisiatif yang akan dikembangkan bersama, perlu ada kejelasan terkait target konkret dan jadwal kerja yang direncanakan. Misalnya, gagasan yang jelas tentang tujuan dan kemungkinan konten platform sosial dapat membantu menentukan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dan pemegang hak dapat mendukung inisiatif tersebut, seperti dengan berkontribusi dalam pengumpulan atau pembagian data. Klarifikasi peran dan tujuan tersebut dapat membantu meningkatkan rasa kepemilikan para peserta dan pembagian tugas di antara berbagai jenis OMS.

3. Akui ketidakseimbangan kekuatan dan perbedaan antar-OMS

Meskipun banyak OMS memiliki tujuan yang sama, strategi dan prioritas mereka sering kali berbeda. Para narasumber menekankan bahwa Platform Sosial harus dirancang sebagai alat yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok sesuai dengan tujuan dan prioritas mereka sendiri. Ini berarti bahwa OMS yang menggunakan strategi advokasi yang sangat berbeda dapat sepakat bahwa suatu platform sosial bermanfaat, meskipun menggunakan data dengan cara yang sangat berbeda pula. Pemanfaatan data dapat berbeda, bergantung pada apakah OMS menggunakan strategi internal dengan berkolaborasi dengan perusahaan atau strategi eksternal dengan menyebut dan memermalukan perusahaan. Penting juga untuk menjadi penengah antara OMS dengan berbagai jenis pengetahuan dan kekuatan, misalnya dengan menghargai pengetahuan dan pengalaman lokal secara setara dengan pengetahuan teknis atau ahli.

4. Tata kelola dan kepemilikan

Dewan tata kelola yang representatif harus dibentuk melalui proses yang transparan dan partisipatif. Dewan yang terdiri dari para OMS ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi pembaruan data berkala, mengevaluasi kumpulan data baru untuk dimasukkan, dan memastikan bahwa keputusan mencerminkan prioritas OMS dan pemegang hak. Yang terpenting, struktur tata kelola harus secara jelas mendefinisikan siapa yang memiliki data, siapa yang membuat keputusan tentang data apa yang dimasukkan atau dikecualikan, dan bagaimana keputusan ini dibuat. Sangat penting bahwa organisasi akar rumput dan para pemegang hak memainkan peran sentral dalam struktur tata kelola ini. Dewan juga harus menjaga komunikasi berkelanjutan dengan para pelaku masyarakat sipil lainnya dan lembaga negara terkait untuk memperkuat kolaborasi dan keselarasan dengan upaya advokasi dan pembuatan kebijakan.

5. Memastikan transparansi dan keberlanjutan pendanaan

Banyak OMS, terutama para pemegang hak dan organisasi masyarakat lokal, memiliki kapasitas yang terbatas. Kejelasan tentang pendanaan yang tersedia—untuk partisipasi dan tugas-tugas yang spesifik—dapat membantu organisasi mengalokasikan waktu dan sumber daya, meningkatkan perencanaan, dan tetap terlibat selama proses berlangsung. Hal ini memungkinkan OMS mengalokasikan sumber daya manusia dan waktu guna berkontribusi untuk tugas-tugas yang spesifik dalam pengembangan platform sosial, misalnya dengan berkomitmen mengumpulkan jenis data tertentu dan menyiapkannya untuk integrasi ke dalam platform.

Namun, bagi LSM dan kelompok pemangku hak yang lebih kecil, keterlibatan jangka panjang mungkin sulit dipertahankan jika pendanaan pada masa mendatang tidak pasti. Oleh karena itu, tidak hanya transparansi, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan prediktabilitas pendanaan sangat penting untuk mendukung partisipasi mereka yang berkelanjutan.

6. Prioritaskan partisipasi pemangku hak dan akar rumput

Banyak platform dan penyedia data yang ada untuk risiko sosial dan hak asasi manusia beroperasi secara top-down (dari atas ke bawah). Untuk mendapatkan akses ke data lokal yang bermakna dan memastikan bahwa inisiatif tersebut memberdayakan kelompok, pekerja, dan kolektif yang terdampak, mereka harus dilibatkan. Para pelaku ini mungkin juga membutuhkan dukungan tambahan (teknis, finansial, dan logistik) untuk berpartisipasi secara bermakna dan rasa percaya perlu dibangun. Untuk membina hubungan saling percaya, pertemuan harus difasilitasi oleh penyelenggara independen, dan komunikasi harus berkelanjutan dan terbuka. Lebih lanjut, para peserta menekankan bahwa pertemuan formal dan informal di sela-sela lokakarya pemangku kepentingan sangat penting agar dapat lebih memahami kebutuhan dan kepentingan beragam pelaku yang terlibat. Karena beberapa peserta mungkin ragu untuk menyampaikan kekhawatiran dalam suasana formal, dialog informal dapat memainkan peran penting dalam memunculkan berbagai perspektif.

7. Ciptakan ruang yang aman dan inklusif

Saat menghadirkan para pelaku eksternal, seperti pakar atau perwakilan dari lembaga negara ke meja dialog, para peserta harus diajak berkonsultasi dan diminta persetujuan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa mereka merasa nyaman dengan kehadiran para pelaku tersebut.

8. Lakukan pendekatan langkah demi langkah

Saat mengembangkan sebuah platform sosial, masuk akal untuk mulai bekerja dengan beberapa basis data terpilih. Setelah basis data ini dimasukkan ke dalam satu platform interaktif, platform tersebut dapat dikembangkan, diperbarui, dan dikembangkan.

VIII. Referensi

- Baletti, B., 2014. Saving the Amazon? Sustainable soy and the new extractivism. *Environment and Planning A*, 46(1), pp.5-25. <https://doi.org/10.1068/a45241>
- Bastos Lima, M. G., & Persson, U. M. (2020). Commodity-centric landscape governance as a double-edged sword: The case of soy and the Cerrado Working Group in Brazil. *Frontiers in Forests and Global Change*, 3, 27. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00027>
- Brandão, J., Rausch, L., Munger, J., Naughton-Treves, L. and Gibbs, H.K., 2024. Behind the cattle industry: Modern slave labor used to produce Brazil's beef and leather. *Environmental Development*, 51, p.101000. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101000>
- Fern. (2024). *Creating a forest and rights observatory: A Brazilian case study*. Brussels: Fern. https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2024/Fern_Creating_a_forest_and_rights_observatory_a_Brazilian_case_study.pdf
- Gardner, T. A., Benzie, M., Börner, J., Dawkins, E., Fick, S., Garrett, R., Godar, J., Grimard, A., Lake, S., Larsen, R. K., Mardas, N., Parry, J., Sembres, T., Suavet, C., Strassburg, B. B. N., Trevisan, A., West, C., & Wolvekamp, P. (2019). Transparency and sustainability in global commodity supply chains. *World Development*, 121, 163–177. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.025>
- Garnett, Stephen, Neil Burgess, John Fa, Álvaro Fernández-Llamazares, Zsolt Molnár, Cathy Robinson, James Watson et al. 2018. A Spatial Overview of the Global Importance of Indigenous Lands for Conservation. *Nature Sustainability* 1(7): 369. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6>
- Gustafsson, M. T., Schilling-Vacaflor, A., & Lenschow, A. (2023). The politics of supply chain regulations: Towards foreign corporate accountability in the area of human rights and the environment? *Regulation & Governance*, 17(4), 853–869. <https://doi.org/10.1111/rego.12526>
- Gustafsson, M. T., & Schilling-Vacaflor, A. (forthcoming). Civil Society Strikes Back: How Global South Coalitions Are Shaping Corporate Accountability in the Age of Mandatory Due Diligence. *Global Environmental Politics*.
- May, P. H., & Ozinga, S. (2021). *A deforestation and rights observatory – A case study from Brazil*. Fern. <https://www.fern.org/publications-insight/a-deforestation-and-rights-observatory-2446/>
- Merino, R., & Gustafsson, M. T. (2021). Localizing the indigenous environmental steward norm: The making of conservation and territorial rights in Peru. *Environmental Science & Policy*, 124, 627-634. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.005>
- Phillips, N. and Sakamoto, L., 2012. Global production networks, chronic poverty and 'slave labour' in Brazil. *Studies in Comparative International Development*, 47(3), pp.287-315. <https://doi.org/10.1007/s12116-012-9101-z>
- Russo Lopes, G., Bastos Lima, M. G., & dos Reis, T. N. P. (2021). Maldevelopment revisited: Inclusiveness and social impacts of soy expansion over Brazil's Cerrado in Matopiba. *World Development*, 139, 105316. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105316>
- Sauer, S., 2018. Soy expansion into the agricultural frontiers of the Brazilian Amazon: The agribusiness economy and its social and environmental conflicts. *Land use policy*, 79, pp.326-338. <https://doi.org/10.1007/s12116-012-9101-z>

Schilling-Vacaflor, A., 2023. The sustainability governance of global supply chains: transnational approaches and the neglect of local development agendas. In Handbook on International Development and the Environment (pp. 281-295). Edward Elgar Publishing.

Schilling-Vacaflor, A., & Gustafsson, M. T. (2024). Integrating human rights in the sustainability governance of global supply chains: Exploring the deforestation–land tenure nexus. *Environmental Science & Policy*, 154, Article 103690. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103690>

Silva, A.A., Leite, A., De Castro, L.F.P. and Sauer, S., 2023. Green grabbing in the Matopiba agricultural frontier. The Institute of Development Studies and Partner Organisations.

Souza et al. (2020) - Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/rs12172735>.

VIV. ampiran. Peserta di lima lokakarya

Peserta lokakarya ke-2, 19 Juni 2023 (lokakarya online)

1. Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
2. Franziska Rau, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
3. Gabriela Russo Lopes, Diversa Socioenvironmental Consultancy
4. Guilherme Eidt, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
5. Heidi Buzato, Imaflora
6. Helen Bellfield, Global Canopy
7. Isabel Figueiredo, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
8. José Benatti, Universidade Federal do Pará (UFPA)
9. Juliana Miranda, Observatório Matopiba
10. Mairon Bastos Lima, Stockholm Environment Institute (SEI)
11. Marcelo Elvira, WWF
12. Margareta Nilsson, the Tenure Facility
13. Marina Guyot, Imaflora
14. Mauricio Correia, Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR)
15. Patricia Pinho, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
16. Rodrigo Bellezoni, Centro de Inteligência Territorial (CIT/UFMG)
17. Sandra Kishi, Ministério Público Federal (MPF)
18. Saskia Ozinga, Fern
19. Sérgio Sauer, Universidade de Brasília
20. Tasso Azevedo, MapBiomas
21. Tiago Reis, Global Canopy
22. Yuri Salmona, Instituto Cerrado

Peserta lokakarya ke-2, 16 November 2023

1. Acácio Leite, Observatório dos Conflitos Socioambientais do Matopiba
2. Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
3. Almut Schilling-Vacaflor, FAU Erlangen-Nuremberg
4. Ana Crisostomo, WWF-Brasil
5. Ana Paula Valdiones, Instituto Centro de Vida (ICV)
6. Anderson Antonio Silva, Observatório Matopiba
7. Antonio Oviedo, Instituto Socioambiental (ISA)
8. Bianca Muniz, Agência Pública
9. Bianca Muniz, Agência Pública
10. Bruno Fonseca, Agência Pública
11. Camila Mikie, Conectas
12. Daniela Jerez, WWF-Brasil
13. Felipe Cerignoni, Imaflora
14. Francis Rocha, Observatório Matopiba
15. Franziska Rau, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ
16. Gabriela Russo Lopes, Diversa Socioenvironmental Consultancy
17. Guadalupe Sátiro, University of Brasília
18. Gustavo Ferroni, Oxfam Brasil
19. Heidi Buzato, Imaflora
20. Isolete Wichinieski, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
21. Jean Timmers, WWF-Brasil
22. Joana Faggin, AidEnvironment
23. Joice Bonfim, Campanha Nacional em Defesa do Cerrado
24. Jose Benatti, Federal University of Pará (UFPA)
25. Marcel Gomes, Repórter Brasil
26. Marco Garcia, AidEnvironment
27. Maria-Therese Gustafsson, Stockholm University
28. Nicole Polsterer, Fern
29. Olivia Zerbini, IPAM
30. Peter May, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
31. Rafael Giovanelli, Instituto Escolhas
32. Saskia Ozinga, Fern
33. Tales Pinto, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
34. Tasso Azevedo, Mapbiomas
35. Tomás Carvalho, Trase

Peserta lokakarya ke-3, 16 April 2024

1. Acacio Leite, Observatório dos Conflitos Socioambientais do Matopiba
2. Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
3. Almut Schilling-Vacaflor, FAU Erlangen-Nuremberg
4. Araê Claudinei Lombardi, Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM)
5. Carla Guareschi, Instituto Igarapé
6. Carolina Stange Moulin, Secretariat for the Environment and Sustainable Development of the State of Goiás
7. Cecilia Viana, Climate and Land Use Alliance – Brazil (CLUA)
8. Daniela Jerez, WWF-Brasil
9. Daniele Galvão de Sousa, Center for Climate Crime Analysis (CCCA)
10. Gabriela Russo Lopes, Diversa Socioenvironmental Consultancy
11. Guadalupe Sátiro, Universidad de Brasilia
12. Guilherme Eidt, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
13. Gustavo Cruz, INA
14. Gustavo Ferroni, Oxfam
15. Isabel Figueiredo, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
16. Laíssa Pollyana Carmo, Reporter Brazil
17. Luis Meneses, Global Canopy
18. Marcelo Elvira, Observatório do Código Florestal
19. Marco Garcia, AidEnvironment
20. Maria Eduarda Senna Mury, Center for Climate Crime Analysis (CCCA)
21. Maria-Therese Gustafsson, Stockholm University
22. Mariana Pontes Campos, Campanha Nacional em Defesa do Cerrado
23. Marina Comandulli, Global Canopy
24. Mikael Freitas, Center for Climate Crime Analysis (CCCA)
25. Nicole Polsterer, Fern
26. Rodrigo Bellezoni, Center for Territorial Intelligence (CIT)
27. Romulo Batista, Greenpeace
28. Ronilson Costa, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
29. Sérgio Sauer, Universidade de Brasília
30. Sofia Barretto, Imaflora
31. Tatiana Oliveira, Inesc
32. Vivian Ribeiro, Stockholm Environment Institute
33. Zilma Maia, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás

Peserta lokakarya ke-4, 14 Juni 2024 (lokakarya online)

1. Acacio Zuniga Leite, Observatório dos Conflitos Socioambientais do Matopiba
2. Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
3. Almut Schilling-Vacaflor, FAU Erlangen-Nuremberg
4. Cecilia Viana, Climate and Land Use Alliance – Brazil (CLUA)
5. Daniela Jerez, WWF-Brasil
6. Daniele Galvao, WRI Brasil, Universidade de Brasília
7. Gabriela Russo Lopes, Diversa Socioenvironmental Consultancy
8. Guilherme Eidt, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
9. Gustavo Ferroni, Oxfam
10. Isabel Figueiredo, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
11. Luis Meneses, Global Canopy
12. Marcelo Elvira, Observatório do Código Florestal
13. Maria-Therese Gustafsson, Stockholm University
14. Marina Comandulli, Global Canopy
15. Nicole Polsterer, Fern
16. Olivia Zerbini Benin, Ipam
17. Roberta del Giudice
18. Rodrigo Bellizoni, Center for Territorial Intelligence (CIT)
19. Sofia Bosque Barretto, Imaflora
20. Tales dos Santos Pinto, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
21. Tasso Azevedo, Mapbiomas
22. Vivian Ribeiro, Diversa Socioenvironmental Consultancy

Peserta lokakarya ke-5, 11 Februari 2025

1. Acacio Leite, Observatório dos Conflitos Socioambientais do Matopiba
2. Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
3. Alice Thuault, Instituto Centro de Vida (ICV)
4. Almut Schilling-Vacaflor, FAU Erlangen-Nuremberg
5. Ana Carolina Crisostomo, WWF-Brasil
6. Antonio Oviedo, Instituto Socioambiental (ISA)
7. Carolina Comandulli, Full Circle Foundation
8. Cecilia Viana, CLUA
9. Daniel Silva, WWF-Brasil
10. Debora Lima, Tamo de Olho, Observatório Matopiba
11. Diego Costa, Mapbiomas
12. Fabio Martins, Campanha Nacional em Defesa do Cerrado
13. Felipe Moura, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
14. Gabriela Russo Lopes, Diversa Socioenvironmental Consultancy
15. Guadalupe Satiro, Observatório Matopiba.
16. Guilherme Eidt, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
17. Guillaume Tessier, Instituto Clima e Sociedade (ICS)
18. Isabel Figueiredo, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
19. Juliana Miranda, WWF-Brasil
20. Karina Melo, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
21. Lais Brasileiro, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
22. Marcelo Aguiar, Imaflora
23. Marcelo Elvira, Observatório do Código Florestal
24. Marcos Rosa, Mapbiomas
25. Maria-Therese Gustafsson, Stockholm University
26. Mariana Pontes Campos, Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, Global Canopy
27. Marina Comandulli, Global Canopy
28. Marlina Bischoff, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
29. Nicole Polsterer, Fern
30. Patricia Silva, Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
31. Raisa Pina, Global Canopy
32. Raphael Pieroni, Earthsight
33. Ronilson Costa, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
34. Sérgio Sauer, Universidade de Brasília
35. Tales dos Santos Pinto, Comissão Pastoral da Terra (CPT)
36. Tasso Azevedo, MapBiomas
37. Tiago Reis, Global Canopy
38. Vivian Ribeiro, Diversa Socioenvironmental Consultancy
39. Yuri Salmons, Instituto Cerrado



Fern adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan Uni Eropa mendukung perlindungan hutan serta hak-hak masyarakat yang bergantung padanya. Pekerjaan kami berfokus pada pemajuan hak-hak masyarakat hutan serta berbagai isu yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk bantuan kemanusiaan, pola konsumsi, perdagangan, investasi, dan perubahan iklim. Seluruh kegiatan kami dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan organisasi masyarakat sipil serta gerakan sosial dan lingkungan di berbagai belahan dunia.

www.fern.org

